



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Maret 2024/Khusus - Akhir Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : LEGISLATIF

LEMBAGA : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA

UNIT KERJA : FRAKSI PDI PERJUANGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HERIYUS
2. Jabatan : ANGGOTA DPRD
3. NHK : 535044

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	350.000.000
1. Tanah Seluas 1741 m2 di KAB / KOTA MURUNG RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	231.000.000
1. MOBIL, HYUNDAI SANTA FE 2,4 A/T / JEEP Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000		
2. MOTOR, YAMAHA 1LB / SOLO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	50.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	631.000.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	631.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Maret 2024/Khusus - Akhir Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : LEGISLATIF

LEMBAGA : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA

UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RAHMANTO MUHIDIN
2. Jabatan : WAKIL KETUA DPRD
3. NHK : 530177

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 570.000.000

1. Tanah Seluas 800 m2 di KAB / KOTA MURUNG RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA MURUNG RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 325.000.000

1. MOBIL, ISUZU NKR 71 HD E2-2 / LIGHT TRUCK DUMP Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
2. MOBIL, HONDA HR-V RU1 1.5 E CVT (CKD) / MINIBUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 25.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 920.000.000

III. HUTANG Rp. 86.465.960

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 833.534.040

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA

UNIT KERJA : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SARWO MINTARJO
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 698539

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	465.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 657 m2/657 m2 di KAB / KOTA MURUNG RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000		
2. Tanah Seluas 625 m2 di KAB / KOTA MURUNG RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	30.000.000
1. MOTOR, NMAX METIC Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	2.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	8.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	505.000.000
III. HUTANG	Rp.	60.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	445.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RAHMAT KURNIAWAN TAMBUNAN
2. Jabatan : ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
3. NHK : 403064

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.065.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 249 m2/75 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 670.000.000		
2. Tanah Seluas 596 m2 di KAB / KOTA MURUNG RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000		
3. Tanah Seluas 1500 m2 di KAB / KOTA MURUNG RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000		
4. Tanah Seluas 1.2 m2 di KAB / KOTA MURUNG RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000		
5. Tanah Seluas 10 m2 di KAB / KOTA MURUNG RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000		
6. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA MURUNG RAYA, HASIL SENDIRI , HIBAH TANPA AKTA , Rp. 25.000.000		
7. Tanah Seluas 4000 m2 di KAB / KOTA , HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	----
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	62.012.851
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.127.012.851

**III. HUTANG**

Rp. 111.126.529

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.015.886.322

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.